

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK AIR
PASANG SURUT DI DAERAH TUNGKAL ILIR KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT JAMBI**

SKRIPSI



Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu

Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum

Universitas Jambi

Oleh :

M. Abduh Fadillah Alvi

Nim. H1A118133.

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK
AIR PASANG SURUT DI DAERAH TUNGKAL ILIR KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT JAMBI

Nama : M. Abduh Fadillah Alvi
Fakultas : Hukum
Program Study : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A118133

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II untuk
diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Hukum Universitas Jambi

Jambi, 16 Juni 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum
NIP 196404111994031001

Dosen Pembimbing II



Wahyu Rohayati, S.IP., M.SI
NIP 198609152024212001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK AIR
PASANG SURUT DI DAERAH TUNGKAL ILIR KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT JAMBI**

Nama : M. Abduh Fadillah Alvi
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A118133

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan dewan
Penguji Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, Juni 2025

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. A. Zarkasih, S.H., M.HUM	Pembimbing ketua	1. 2. 3.
2.	Wahyu Rohayati, S.IP., M.SI	Pembimbing anggota	
3.	Hapsa, S.IP., M.I.P.	Penguji ketua	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karya ini Kupersembahkan Kepada :

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karya ini Kupersembahkan Kepada :

Alm mamak saya ekka shitta ashari

Orang tua saya

Saudara-saudara saya

Dan orang yang selalu berdiri di samping saya andini fitriani

We love all in kali pokonya.

LEMBAR MOTTO

**“Pada akhirnya kamu akan takjub melihat bagaimana Allah membolak
balikan keadaan hanya untuk mengabulkan doamu. Maka bersabarlah ngga
ada hal yang mustahil bagi Allah jika hal yang tidak mungkin itu adalah
milikmu.”**

(Quotest ANDINI FITRIANI)

**Mata memandang kedepan- Pundak tegapkan- pandangan mengarah
kemasa depan-keluh dan kesah menjadi pijakan agar menjadi orang yang
berdiri paling depan**

SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Abduh Fadillah Alvi
Nim : H1A118133
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Air
Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat- Jambi
Alamat : jln. Tp seriwijaya kecamatan Rawa Sari
No. Hp : 082218165636

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (Plagiarisme) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam kenyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan

M. Abduh Fadillah Alvi
Nim. H1A118133

ABSTRACT

Environmental damage caused by sea tides, one of which occurs in Tungkal Ilir District, West Tanjung Jabung Regency. Tungkal Ilir is an area that experiences rising sea levels during the change of day and night. Weather such as the rainy season also has a significant effect on the increase in sea water volume in this area. When the tide is high, water from the sea evaporates into the mainland, this causes several road accesses in Tungkal Ilir Regency, West Tanjung Jabung Regency to be covered by water. This certainly has a negative impact on the environment and the surrounding ecosystem. Water that enters the mainland due to the tide from the sea also often brings garbage and spreads it around the affected area. Using a qualitative research method with a descriptive approach. Efforts to thicken concrete and asphalt roads, build drainage and allocate funds for infrastructure are concrete things that have been done by the West Tanjung Jabung Government in overcoming this problem. However, not infrequently efforts made to overcome the impact of environmental damage due to sea tides in the West Tanjung Jabung Regency area encounter obstacles. Infrastructure funding constraints, lack of public concern for drainage maintenance that should not be filled with garbage also have a very big impact on the efforts that have been made. The results of this study are the efforts of the West Tanjung Jabung government in overcoming the impact of environmental damage due to tidal flooding and how the role of the community should be so that the obstacles found can be overcome optimally.

Keywords : The Role Of Government, Tide, Environmental Damage

INTISARI

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pasang surut air laut salah satunya terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati Gerakan masyarakat dan pemerintah dalam menangani masalah yang ada untuk mengatasi dampak dari pasang air di tungkal ilir. Tungkal ilir merupakan daerah yang mengalami kenaikan air laut pada saat pergantian siang dan malam. Cuaca seperti musim hujan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan volume air laut di daerah ini. Ketika air pasang, air dari laut menguap masuk ke daratan, hal ini menyebabkan beberapa akses jalanan di Kabupaten Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertutup air. Hal ini tentunya memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan ekosistem yang berada disekitarnya. Air yang masuk ke daratan akibat pasang dari laut juga tak jarang membawa sampah – sampah dan menyebar ke sekeliling daerah yang berdampak. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Upaya penebalan jalan beton dan aspal, pembangunan drainase dan pengakolasian dana untuk infrastruktur adalah hal – hal konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi persoalan ini. Namun, tak jarang upaya yang dilakukan dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan akibat pasang surut air laut di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menemukan hambatan. Hambatan dana infrastruktur, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan drainase yang seharusnya tidak dipenuhi sampah juga memberikan dampak sangat besar dalam upaya – upaya yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini adalah upaya pemerintah Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan akibat banjir pasang surut air laut dan bagaimana seharusnya peran masyarakat agar hambatan yang ditemukan dapat diatasi dengan maksimal.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pasang Surut Air Laut, Kerusakan Lingkungan

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah karena berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dengan judul " **Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat**".

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi penulis menyadari bahwa tanpa bekal pengetahuan dan bimbingan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dan bantuan semua pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut ambil bagian dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan mendidik saya menjadi seorang anak yang Tangguh dan pantang menyerah terhadap semua yang saya lewati dan saya jalani. Ungkapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik dan lebih maju lagi
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memimpin penyelenggaraan Pendidikan di Fakultas dan membina

civitas akademik di Fakultas Hukum serta membantu penulis dalam pelegalan surat-surat terkait administrasi perkuliahan.

3. Ibu Prof. Hj. Muksibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, kerja sama dan sistem informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah berkontribusi pada peningkatan mutu kegiatan akademik dan sistem informasi di Fakultas Hukum.
4. Bapak Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perekonomian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah berkontribusi dalam membangun Fakultas hukum Menjadi lebih baik melalui penganggaran dan alokasi untuk seluruh kebutuhan Fakultas.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum universitas Jambi yang telah berkontribusi dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum.
6. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Ph.D., Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu, motivasi, dorongan, serta semangat untuk menyelesaikan masa studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Terimakasih banyak yang setiap ketemu saya memberikan dorongan dan selalu mengingatkan saya agar tidak lupa dengan waktu.

8. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum dosen pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing serta mengarahkan penulis.
9. Ibu Wahyu Rohayati, S.IP., M.SI. dosen pembimbing 2 yang telah membimbing, memberi arahan serta masukan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi, terkhusus Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan di jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11. Bapak/Ibu Tenaga administrasi Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi.
12. Seluruh keluarga besar dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah membantu dan memudahkan penulisan serta pengambilan data
13. Serta kepada dinas lingkungan hidup dan diarahkan kepada bapak budi selaku ketua kebersihan kuala tungkal mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dan saran serta di permudahnya pengambilan data dalam penulisan pada penelitian ini,
14. Terimah kasih juga kepada keluarga saya telah memberikan bantuan dan dorongan kepada saya selama masa proses perkuliahan hingga sampai saat ini.
15. Kepada Wanita yang selalu berdiri di samping saya andini fitriani yang selalu ada saat saya susah dan senang dan membantu memberikan motivasi saya.

16. Kepada teman teman universitas jambi terkhususnya jurusan ilmu pemerintahan ini Angkatan 2018 yang juga turut membantu terselesaikan perkuliahan ini
17. Kepada diriku yang masih bisa bertahan dan berjuang hingga saat ini , terima kasih untuk tidak sakit.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Landasan Teori.....	11
1.6 Kerangka Fikir	19
1.7 Metode Penelitian.....	20
1.7.1 Jenis Penelitian	20
1.7.2 Lokasi Penelitian	20
1.7.3 Fokus Penelitian	21
1.7.4 Sumber Data	21
1.7.5 Teknik Penentuan Informan	22
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data	23
1.7.7 Teknik Analisi Data	24
1.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data).....	25
 BAB II. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
2.1 Sejarah Singkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat	26
2.2 Letak Geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat	32

2.3 Demografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	32
2.4 Visi Msi Dan Struktur Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	33
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menanggulangi Pasang Surut Air Laut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	36
3.2 Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menanggulangi Pasang Surut Air Laut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	52
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama-Nama dan Jabatan Pemerintah Daerah serta masyarakat Tanjung Jabung Barat	20
Tabel 3.1 Data Sampel Partisipasi RT	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	17
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda.....	28
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	28
Gambar 3.1 Gotong Royong Warga	34
Gambar 3.2 Banner Kampanye Lingkungan	35
Gambar 3.3 Program Penanaman Bersama	39

BAB I

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai rumah bagi manusia maupun makhluk dengan spesies yang berbeda untuk berkembang biak dan hidup, beraktivitas dan berinteraksi. Melalui hubungan ini, hubungan timbal balik terjadi, khususnya dengan peran signifikan masyarakat dalam ekosistem. Maka alam sekitar merupakan medium bagi semua makhluk untuk menghadapi sebuah kehidupan dan membangun hubungan yang saling membutuhkan.¹ Interaksi antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki sebuah aturan yang jika dilanggar dapat dikenakan sanksi. Dalam menghadapi permasalahan yang ada pada lingkungan, sistem aturan atau norma masyarakat mempunyai peran penting dalam mengelola interaksi dan sudut pandang yang terkait dengan lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan dinamika masalah lingkungan, dimana terdapat tantangan pada kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup mempunyai tantangan yang sangat kompleks dan jelas, serta memerlukan pengawasan lebih oleh pemerintah dalam hal perumusan kebijakan, penegakan hukum dan koordinasi antar instansi. Pencemaran lingkungan ialah permasalahan kompleks serta mempunyai dampak yang berhubungan dengan kesehatan manusia dan ekosistem sekitarnya. Kerusakan ekosistem seringkali terkait dengan aktivitas manusia, sementara manusia berharap

¹ Wisnu Arya Wardhana, *Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995, hal.11.

hidup tanpa polusi atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh hal – hal yang tidak bisa dihindarkan.

Hukum lingkungan berperan penting dalam mengendalikan tindakan manusia terhadap lingkungan. Tanpa pengaturan ini, manusia dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Meski karena bencana alam seperti gempa dan banjir dapat merusak lingkungan, sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi karena manusia memasukkan bahan atau energy ke dalam lingkungan, berakibat turunnya kualitasnya serta merusak fungsinya lingkungan hidup sesuai dengan tujuannya.² Pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada kehidupan saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan dimasa depan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh – sungguh dan konsisten oleh semua pihak terkait. Negara harus mencegah hal – hal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi disebabkan oleh tangan manusia tetapi faktor alam juga menjadi penentu kerusakan lingkungan terjadi. Contohnya kerusakan lingkungan yang bisa terjadi karena adanya pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah salah satu fenomena alam yang paling menarik dan penting yang terjadi di bumi. Fenomena ini terjadi sebagai akibat dari gaya tarik menarik antara bumi, bulan dan matahari. Pasang surut tidak hanya memiliki dampak signifikan pada ekologi dan geologi pesisir, tetapi juga mempengaruhi kehidupan manusia terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir .

² Deni Syaputra, Peran serta masyarakat dan kewenangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, Menara Ilmu XI, Yogyakarta, 2017, hal.45.

Pasang surut air laut juga merupakan perubahan periodic dalam tinggi permukaan laut yang terjadi secara berkala. Fenomena ini menyebabkan air laut naik dan turun secara teratur sepanjang hari. Pasang surut air laut memiliki dua fase utama, pasang (air naik) dan surut (air turun).

Faktor – faktor yang mempengaruhi pasang surut air laut antara lain adalah:

1. Gravitasi Bulan Dan Matahari : Gaya tarik bulan adalah faktor utama yang mempengaruhi pasang surut air laut. Bulan menarik air di arahnya, menyebabkan air laut naik kecil yang disebut pasang. Disisi lain bumi yang berlawanan dari bulan, terbentuk surut karena tarikan lebih lemah ini. Matahari juga memiliki pengaruh pada pasang surut meskipun kurang signifikan dibandingkan dengan bulan.
2. Bentuk pantai dan lautan : Bentuk pantai, lebar mulut sungai dan kedalaman lautan juga mempengaruhi besarnya pasang surut di suatu wilayah. Di pesisir yang sempit dan dalam, perubahan tinggi air laut bisa sangat dramatis. Sebaliknya, di wilayah yang lebih lebar dan dangkal, perubahan mungkin kurang terasa.
3. Topografi Lautan : Topografi dasar lautan, seperti terumbu karang, pulau dan gundukan bawah laut juga dapat mempengaruhi pola pasang surut local dengan mempengaruhi aliran air laut.

Pasang surut air laut juga memberikan beberapa dampak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup, diantaranya adalah :

1. ekologi pesisir : Pasang surut adalah habitat bagi berbagai jenis organisme laut. Hewan – hewan seperti kepiting, tiram, dan burung pesisir sangat

bergantung pada perubahan air laut ini untuk mencari makan dan berkembang biak.

2. Transportasi dan Navigasi : pasang surut air laut mempengaruhi navigasi kapal di perairan pesisir. Kapal – kapal besar mungkin mengalami kesulitan saat pasang surut rendah, sementara kapal – kapal kecil mungkin terhalang oleh pasang surut tinggi.
3. energy terbarukan : beberapa pembangkit listrik tenaga air dan energy pasang surut mengambil keuntungan dari perubahan air laut untuk menghasilkan listrik.
4. potensi bencana : pasang surut tinggi bisa menjadi faktor yang berkontribusi pada bencana banjir pesisir. Kombinasi pasang surut tinggi dan badai tropis dapat mengakibatkan banjir pesisir yang merusak.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pasang surut air laut salah satunya terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tungkal ilir merupakan daerah yang mengalami kenaikan air laut pada saat pergantian siang dan malam. Cuaca seperti musim hujan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan volume air laut didaerah ini.

Ketika air pasang, air dari laut menguap masuk ke daratan, hal ini menyebabkan beberapa akses jalanan di Kabupaten Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertutup air. Hal ini tentunya memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan ekosistem yang berada disekitarnya. Air yang masuk ke daratan akibat pasang dari laut juga tak jarang membawa sampah – sampah dan menyebar ke sekeliling daerah yang berdampak.

Masuknya air ke permukaan daratan yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir tentunya menimbulkan kerusakan lingkungan. Air yang masuk membawa sampah, tertutupnya akses jalan karena banjir dan ini juga menyebabkan kendaraan masyarakat rusak serta menyebabkan karatan akibat terkena air laut. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang serius, mengingat pasang surut air laut tak jarang terjadi dan bisa diperkirakan jadwalnya. Penanganan pencegahan kerusakan lingkungan tentunya harus melibatkan pihak masyarakat dan pemerintah setempat agar bisa ditangani dampaknya dengan efektif.

Dengan melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Bapeda dan Dinas Lingkungan serta didukung oleh pihak – pihak lain, penanganan akibat pasang surut air laut bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa adanya hambatan akibat air yang masuk ke daratan dan pemukiman.

Hasil penelitian yang mengkaji peran pemerintah daerah sangat beragam, dan penelitian tersebut berasal dari berbagai sumber dan tempat penelitian. Berikut ini adalah beberapa rangkuman penelitian tersebut:

Penelitian Erwin (2014) “Tingkat Pencemaran Pada Saat Pasang Dan Surut Di Perairan Pantai Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi pada saat pasang dan surut di perairan pantai kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di perairan pantai Kota Makassar pada bulan Agustus 2013. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak tiga kali pada saat air pasang dan surut. Analisa data dalam penelitian ini diolah secara deskriptif dengan menentukan tingkat pencemaran relative terhadap parameter kualitas air yang diizinkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003,

dengan mengacu pada rumus Numerow. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pemerintah setempat dalam pengemabnagan wilayah pantai dan meminimalisir faktor kerusakan lingkungan hidup akibat pasang surut air laut.

Penelitian Akhmad Mualif Alufi (2017) “Pengaruh Banjir Pasang Air Laut Terhadap Kualitas Lingkungan Pemukiman Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”. Menunjukkan bahwa banjir akibat pasang air laut membuat masyarakat melakukan penyesuaian fisik rumah berbeda dengan fisik rumah pada umumnya. Penyesuaian tersebut dapat berupa peninggian rumah menjadi bentuk panggung atau peninggian lantai rumah dengan tujuan agar air dari banjir pasang laut tersebut tidak masuk ke dalam rumah. Faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dari pemerintah merupakan faktor yang memiliki kontribusi besar dalam pengaruh kualitas lingkungan pemukiman. Faktor ekonomi menjadi faktor dominan karena berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemulihan atau perbaikan rumah yang dilakukan karena banjir pasang air laut yang terjadi. Ada beberapa perbedaan standart penilaian kualitas permukiman antara daerah yang terkena banjir dengan daerah yang tidak terkena banjir pasang air laut.

Penelitian Febriana Restu Kusumaningsih (2017) “Dampak Banjir Pasang Surut Terhadap Masyarakat Pesisir Di Kota Semarang”. Menunjukkan bahwa banjir pasang surut di Kota Semarang disebabkan oleh kombinasi dari kenaikan muka air laut dan penurunan tanah sehingga penduduk harus dapat beradaptasi dengan banjir pasang surut. Dalam penelitian ini dikumpulkan informasi mengenai banjir pasang surut dan dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Peran pemerintah dalam upaya meminimalisir dampak lingkungan

juga diharapkan agar bisa berdampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk kawasan pesisir kota Semarang.

Penelitian Rihandhi Evmibahapsa Yusma (2025) “Kelimpahan Dan Distribusi Mikroplastik Pada Air Dan Sedimen Akibat Pengaruh Pasang Surut Di Kuala Tungkal”. Di daerah pasang surut seperti Kuala Tungkal sampah plastic yang terbawa ke laut sering kali kembali ke daratan bersama air pasang dan mengendap bersama sedimen. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kelimpahan mikroplastik pada air dan sedimen di wilayah pasang surut air laut Kuala Tungkal. Penelitian dilakukan di Sungai Gompong sampai pelabuhan Roro Kuala Tungkal.

Penelitian Tri Eko Manda Putra (2023) “ Pengaruh Sedimen Terhadap Hambatan Arus Sungai Pada Pasang Surut Di Jalan Kampung Laut Kuala Tungkal”. Menunjukkan banjir saat ini sering dimanfaatkan sebagai lahan tempat tinggal oleh penduduk sehingga menyulitkan untuk menanggulangi permasalahan pengaliran air pada beberapa wilayah yang merupakan aliran air alami. Pada umumnya banjir diperkotaan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya curah hujan tinggi, pengaruh fisografi, erosi dan sedimentasi pada saluran, pendangkalan sungai, kapasitas drainase yang kurang memadai, kawasan kumuh, sampah, alih fungsi lahan dan perencanaan penanggulangan banjir yang tidak tepat.

Ada beberapa kesamaan dengan uraian kajian terdahulu, seperti keterlibatan pemerintah dan penyebab kerusakan lingkungannya. Permasalahan dan upaya pemerintah dalam menangani pasang surut air laut di daerah Tanjung Jabung Barat, belum pernah diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memilih untuk menguji hipotesis kerja berdasarkan temuan-temuan tersebut. Selain itu, di

Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, peneliti akan mengamati upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi kerusakan lingkungan saat air pasang surut sekaligus mengatasi kendala yang menghambatnya. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI DAN MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN SAAT AIR PASANG SURUT DI DAERAH TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT”** untuk laporan penelitiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah penelitian yang disusun oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah diberikan:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi dan mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Daerah Dalam Mengatasi dan Mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Untuk Menggambarkan dan Menganalisis Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi dan Mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Mengatasi dan Mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut di daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah uraian beberapa keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya di lingkungan birokrasi yang berkepentingan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Di Desa Pangkal Babu, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penelitian ini dapat membantu Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi dan mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Untuk membantu Pemerintah Daerah di Desa Pangkal Babu, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Mengatasi dan mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.5 Landasan Teori

1. Peran Pemerintah

"Peran" berasal dari kata "kedudukan". Kedudukan mengacu pada tingkat di mana anggota masyarakat diyakini memiliki pengaruh sosial yang signifikan. Salah satu tugas utama yang perlu dilakukan adalah memenuhi peran seseorang³. Status sosial seseorang dalam masyarakat membentuk orientasi atau gagasan tentang perannya, menurut Riyadi. Yang terpenting adalah orang tersebut dan motivasi mereka di balik tindakan yang diinginkan⁴.

Peran (status) bersifat dinamis, dan posisi merupakan bagian darinya. Untuk memenuhi suatu posisi, seseorang harus menjalankan hak istimewa dan tanggung jawab yang menyertainya. Terkait dengan bidang-bidang yang diberikan warga negara kepada kita, tugas kita adalah memastikan bahwa kita memanfaatkannya dengan baik. Orang dalam posisi ini memiliki kekuatan untuk memengaruhi sikap orang lain karena mereka secara konsisten mematuhi norma-norma yang ditetapkan, dan hubungan sosial di antara warga negara berfungsi sebagai penghubung antara berbagai peran yang dimainkan individu dalam komunitas mereka⁵.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, Hal. 845

⁴ Susi Iswanti dan Zulkarnaini, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2022, hlm. 94.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hlm. 845

Ada tiga bagian dalam suatu peran, yaitu:

1. Konsep peran mengacu pada rasa kewajiban individu dalam keadaan tertentu.
2. Karena seseorang memiliki posisi tertentu, orang memiliki harapan tertentu tentang bagaimana ia harus bertindak.
3. "Pelaksanaan peran" mengacu pada bagaimana seorang individu benar-benar bertindak sesuai dengan peran yang diberikan kepada mereka.

Jika ketiganya sinkron, komunikasi antara orang-orang mengalir dengan mudah dan tanpa gangguan. Sudut pandang ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan tanggung jawab berikut:

- a). Pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam interaksi sosial tertentu dikenal sebagai perannya.
- b). Dampak seseorang tumbuh sebanding dengan perannya dalam masyarakat.
- c). etika seseorang bertindak sesuai dengan kedudukannya, ia mengemban peran.
- d). Peran dimainkan ketika kesempatan muncul dan tindakan diambil⁶.

Bagian integral dari setiap negara adalah pemerintahannya, yang bertugas menetapkan kebijakan dan mengarahkan lembaga-lembaganya untuk mencapai tujuan bersama⁷. Pemerintah terdiri dari semua mesin dan alat yang digunakan oleh negara untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya. Merupakan

⁶ *Ibid*, hlm. 925

⁷ Inu Kencana Syafie, "*Ilmu Pemerintahan*", Bandung, Bandar Maju, 2013, hlm. 124.

tanggung jawab pemerintah daerah untuk menumbuhkan potensi pariwisata di daerahnya masing-masing, menurut penerapan teori multi- bagian Pitana Gayatri (2005) tentang peran pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata dalam penelitian ini.

1) Pemerintah Sebagai Motivator

Dalam karyanya tahun 2009, Mudjono berpendapat bahwa istilah "motivator" mengacu pada "dorongan mental" yang mengendalikan dan mengarahkan perilaku manusia.

Peran pemerintah sebagai motivator merujuk pada fungsi pemerintah dalam mendorong, memotivasi, dan menginspirasi masyarakat, lembaga, dan sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya sebagai pengatur dan pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak semangat dan penumbuh inisiatif.

2) Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dalam upaya meningkatkan potensi pariwisata di wilayah otonominya, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan segala fasilitas yang diperlukan. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, proses pembangunan, prosedur perencanaan yang lebih baik, dan penetapan. Untuk memaksimalkan pembangunan daerah, pemerintah sebagai fasilitator bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang mendukung pelaksanaan proyek pembangunan yang mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat. Pelatihan, pendidikan, dan peningkatan

keterampilan termasuk dalam kategori "bantuan", sedangkan uang dan modal ditangani oleh pemerintah melalui program bantuan modal.

3) Pemerintah Sebagai Dinamisor

Menurut prinsip tata kelola yang baik, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah perlu bekerja sama secara efektif agar pertumbuhan optimal dapat terjadi. Perlu adanya koordinasi antara ketiga kelompok tersebut agar industri pariwisata dapat berkembang, dan pemerintah daerah sebagai pihak yang berkepentingan dapat berperan untuk mewujudkannya⁸.

2 . Kebijakan Publik

Menelaah konsep kebijakan atau yang sering kita dengar sebagai "policy" dalam bahasa Inggris perlu dilakukan sebelum membahas lebih jauh tentang gagasan kebijakan publik. Kebijakan suatu organisasi atau pemerintah merupakan serangkaian prinsip dan gagasan yang menjadi pedoman untuk melaksanakan misi dan mencapai tujuannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹. Suatu upaya untuk mencapai tujuan melalui penetapan nilai, tujuan, prinsip, dan prosedur manajemen.

Dalam konteks tertentu dengan kemungkinan dan tantangan untuk mencapai implementasi kebijakan, Carl J. Frederick berpendapat bahwa kebijakan paling baik dipahami sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

⁸ Susi Iswanti dan Zulkarnaini, "*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais*", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2022, hlm.94.

⁹ *Ibid*, Hlm.112

sebelumnya. Komponen utama dari konsep kebijakan, menurut sudut pandang ini, adalah perilaku yang dimaksudkan dan bertujuan; lagipula, kebijakan lebih tentang menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang direkomendasikan dalam berbagai tindakan yang berkaitan dengan suatu masalah¹⁰.

Ada kemungkinan kebijakan tidak dimaksudkan, tetapi tetap saja diberlakukan melalui praktik administratif. Latar belakang historis juga diperlukan untuk memahami definisi kata kebijakan. Kebijakan yang dinamis ini mengungkapkan praktik kebijakannya yang berubah-ubah, seperti halnya gagasan publik. Sederhananya, implementasi kebijakan hanyalah sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan untuk melaksanakan kebijakan publik: memberlakukan kebijakan itu sendiri sebagai suatu program atau membuat kebijakan baru yang dibangun di atas kebijakan yang sudah ada.

a. Keberhasilan Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Ada empat faktor yang memengaruhi metrik yang menentukan bagaimana kebijakan diterapkan¹¹ yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Pencapaian tujuan implementasi kebijakan masyarakat, yang memungkinkan para pelaksana membuat keputusan yang tepat. Untuk mengurangi distorsi implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus

¹⁰Primas Anindyajati, dkk. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Bentuk Kebijakan Publik*. (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan) Vol 7 No 2 Tahun 2019

¹¹ Primas Anindyajati, dkk. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Bentuk Kebijakan Publik*. (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan) Vol 7 No 2 Tahun 2019

dikomunikasikan kepada audiens yang dituju. Informasi akan menjadi kacau jika penerima yang dituju tidak jelas tentang tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, di dalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

3. Disposisi (Kecenderungan-Kecenderungan)

Misalnya, pengabdian, kejujuran, dan temperamen demokratis seseorang adalah contoh watak. Sejauh yang diinginkan pembuat kebijakan, kebijakan akan diimplementasikan secara efektif oleh pelaksana jika ia memiliki watak positif. Proses implementasi kebijakan juga gagal menjadi kebijakan ketika orang yang melaksanakannya memiliki kepribadian atau sudut pandang yang berbeda dari orang yang membuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan kurang lebih dilaksanakan tergantung pada struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Kehadiran prosedur operasi standar merupakan komponen penting dari setiap struktur organisasi. Prosedur ini berfungsi sebagai peta jalan bagi semua karyawan untuk diikuti saat mengambil tindakan. Karena organisasi tidak aktif, hal ini muncul sebagai reaksi internal terhadap keterbatasan waktu pelaksana dan keinginan untuk konsistensi dalam pekerjaan organisasi yang besar dan rumit.

b. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Di antara banyak langkah yang terlibat dalam merumuskan kebijakan adalah :

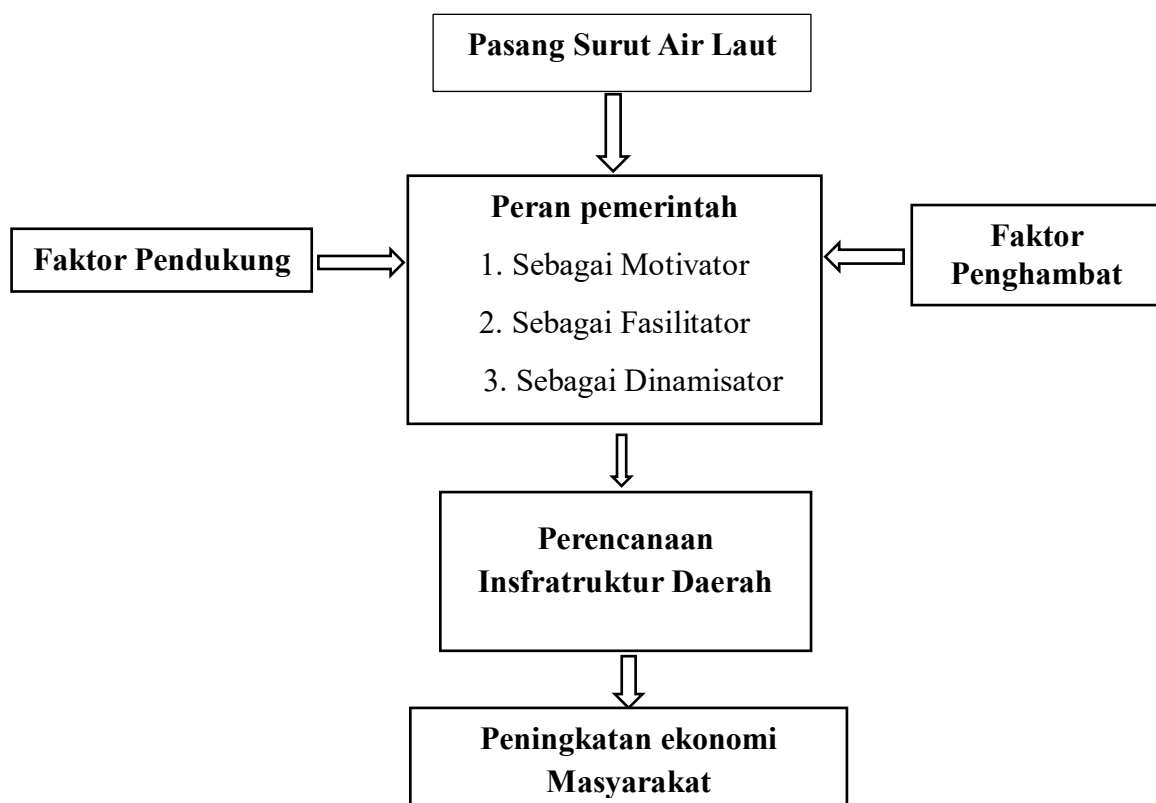
1. Membuat Rencana Untuk Agenda Kebijakan.
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan ¹².

1.6 Kerangka Berpikir

Salah satu cara untuk menggambarkan hubungan timbal balik antara berbagai variabel adalah melalui kerangka berpikir konseptual. Berdasarkan fakta-fakta di lokasi penelitian, kebutuhan peneliti dapat menginformasikan penjelasan

¹²Primas Anindyajati, dkk. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Bentuk Kebijakan Publik*. (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan) Vol 7 No 2 Tahun 2019

singkat tentang kerangka berpikir, yang berfungsi sebagai alur pemikiran untuk penelitian dalam penelitian kualitatif. Berikut adalah bagaimana penelitian ini terstruktur:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Penelitian Kualitatif, merupakan jenis penelitian yang akan memperoleh data deskriptif seperti kalimat-kalimat yang tertulis maupun secara lisan dari perilaku atau orang- orang yang akan di amati. Antara lain tjuan dari penelitian kualitatif ialah untuk menjelaskan suatu fenomenadengan sedalam-dalamnyadengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang akan di teliti¹³.

Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat bagaimana peran pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengelolaan wisata hutan mangrove. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu faktor-faktor dan peran pemerintah dalam mendeskripsikan kausus sosial yang ada pada masyarakat sekitar tempat wisata pasang surut air laut berada.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peneliti mengambil penelitian tentang peran serta strategi pemerintah daerah dalam mengatasi dan mengurangi kerusakan lingkungan saat air pasang surut di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7.3 Fokus Penelitian

¹³ Lexi J. Moleong. *“Metodelogi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi”*,Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hlm.78

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi dan mengurangi kerusakan lingkungan saat air pasang surut di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara khusus, penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang menghambat dalam adanya air pasang surut ini untuk berkembang di masa mendatang dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi Dampak Air Pasang surut di Kabupaten Tanjung jabung Barat secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis dan empiris.

1.7.4 Sumber Data

a. Data Primer

Istilah "data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan di lapangan dari sumber asli¹⁴. Data utama untuk penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi karena merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti adalah alat penelitiannya. Di sini, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan isu utama penelitian.

b. Data Sekunder

Untuk melengkapi data primer yang dianggap relevan dengan penelitian primer, peneliti sering beralih ke sumber informasi sekunder. Dokumen, seperti catatan resmi dan buku yang ditemukan di perpustakaan, merupakan sumber utama

¹⁴ *Ibid*, hlm.80

data sekunder¹⁵. Meskipun data tersebut bersumber dari individu atau dokumen lain, data tersebut tetap dapat digunakan untuk mendukung sumber data primer.

Data informan dianalisis dan disusun oleh penulis. Saat memilih informan, peneliti mencari orang yang dapat memberikan informasi spesifik dan ringkas yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Peneliti dalam proyek ini juga menyertakan:

Tabel 1.1 Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama	Status
1	Bapak Budi	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH)
2	Ibu Nuraini	Fungsional Perencanaan Ahli Muda
3	Bapak azmi	Pengguna insfrastruktur (Masyarakat Kota Kuala Tungkal)
4	Bapak Toni	Pengguna Insfratraktur (Masyarakat Kuala Tungkal)
5	Rusti Siregar	Pemilik Lahan Padi (Masyarakat Tepian)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Op.cit

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan informasi adalah dengan melakukan wawancara, wawancara merupakan bentuk perjumpaan antara dua orang untuk berbagi sebuah informasi ataupun ide yang dapat dilakukan melalui tanya jawab, sehingga dapat diolah menjadi suatu makna dari setiap topik tertentu. Dalam hal ini, ada beberapa macam bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, serta tidak terstruktur.¹⁶

Jenis wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah model wawancara yang dilangsungkan secara leluasa dengan maksud agar jalannya wawancara dilakukan secara fleksibel.¹⁷

2. Dokumentasi

Membuat dokumentasi adalah cara yang bagus untuk mendukung pengumpulan lebih banyak data. Untuk menganalisis topik penelitian, teknik dokumentasi dapat digunakan dengan data yang relevan dengan masalah tersebut. Dokumentasi penelitian ini dapat berbentuk teks, audio, atau visual.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu aktivitas pengamatan dalam pemuatan perhatian semua objek yang menggunakan semua panca indra.¹⁸ Pada penelitian ini,

¹⁶ Moleong, Lexy J. Op.cit., hlm.186.

¹⁷ Salim dan syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Hlm. 119.

¹⁸ Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 234.

observasi digunakan untuk melihat kondisi langsung di lapangan yang mana lapangan tersebut bertempat di Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari tokoh mengenai permasalahan yang akan di bahas, dan data-data tersebut untuk menggambarkan dan menganalisis data.¹⁹

a. Pengumpulan data

Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah mengamati lokasi penelitian. Setelah itu, wawancara dengan informan penelitian dilakukan. Untuk mendukung temuan mereka, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data dari wawancara, peneliti fokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang muncul. Ini termasuk data yang berkaitan dengan penyediaan dan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

c. Penyajian Data

yang merupakan serangkaian fakta terorganisir yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya.

¹⁹ Bagung Suyanto dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-5, hlm. 56

- d. Sketsa Bagian terakhir dari setiap proyek penelitian adalah kesimpulan. Makna, keteraturan pola penjelasan, dan alur sebab akibat dapat dipahami dengan lebih baik dengan bantuan kesimpulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dibahas dalam simpulan, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.

1.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi adalah metode untuk memastikan keandalan data yang menggabungkan dua atau lebih sumber informasi. Penelitian ini menggunakan empat jenis triangulasi yang berbeda, yaitu:

- Triangulasi Data
- Triangulasi Penelitian
- Triangulasi teori
- Triangulasi Teknik Metodologis

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi data yaitu praktik memanfaatkan berbagai jenis data dalam suatu penelitian dan triangulasi teori yaitu praktik memanfaatkan berbagai perspektif dalam menafsirkan data untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam penelitian²⁰.

²⁰ Ahmad Fauzi R, dkk. 2012. *Analisi Peran Pemerintah Daerah terhadap anak Putus sekolah di Kabupaten Wajo*. Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebelum abad ke-17 di tanah Tungkal ini sudah berpenghuni seperti Merlung, Tanjung Paku, Suban yang sudah dipimpin oleh seorang Demong. Kemudian memasuki abad ke – 17 ketika itu daerah ini masih disebut Tungkal saja, daerah ini dikuasai atau dibawah Pemerintahan Raja Johor. Dimana yang menjadi wakil Raja Johor di daerah ini pada waktu itu adalah orang Kayo Depati. Setelah lama memerintah Orang Kayo Depati pulang ke Johor dan ia digantikan oleh Orang Kayo Syahbandar yang berkedudukan di Lubuk Petai. Setelah Orang Kayo Syahbandar kemudian diganti lagi oleh Orang Kayo Ario Santiko yang berkedudukan di Tanjung Agung (Lubuk Petai) dan Datuk Bandar Dayah yang berkedudukan di Batu Ampar, daerahnya meliputi Tanjung Rengas sampai ke Hilir Kuala Tungkal atau Tungkal Ilir sekarang. Memasuki abad ke – 18 atau sekitar tahun 1841 – 1855 Tungkal dikuasai dan dibawah pemerintahan Sultan Jambi yaitu Sultan Abdul Rahman Nasruddin. Pada saat itu kesultanan Jambi mengirim seorang Pangeran yang bernama Pangeran Badik Uzaman ke Tungkal yaitu Tungkal Ulu sekarang. Kedatangannya disambut baik oleh Orang Kayo Ario Santiko dan Datuk Bandar Dayah. Pada tahun 1901 Kerajaan Jambi takluk keseluruhannya kepada Pemerintahan Belanda termasuk Tanah Tungkal khususnya di Tungkal Ulu yang Konteleir jenderal nya berkedudukan di Pematang Pauh. Sehingga pecahlah peperangan antara masyarakat Tungkal Ulu dan Merlung dengan Belanda. Karena mendapat serangan yang cukup berat akhirnya pemerintah Belanda mengundurkan

diri dari wilayah itu. Perperangan itu dipimpin oleh Raden Usman anak dari Badik Uzaman. Raden Usman kemudian wafat dan dimakamkan di Pelabuhan Dagang.

Selanjutnya muncullah Pemerintahan Kerajaan Lubuk Petai yang dipimpin oleh Orang Kayo Usman. Dan Lubuk Petai kemudian membentuk pemerintahan baru yang dibentuk oleh H. Muhammad Dahlan Orang Kayo yang menjadi penyusun pertama dalam pemerintahan yang baru.²¹

2.2 Letak Geografis Kabupaten Tanjung Jabung barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia,. Ibukota kabupaten ini yakni Kuala Tungkal bagian dari Kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 Kecamatan dan memiliki 20 Kelurahan serta 114 Desa. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung. Tanjung Jabung Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Luas wilayahnya 5.009,82 km dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2024 sebanyak 336.978 jiwa.

2.3 Demografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.3.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Tanjung Barat yang berasal dari Suku Jawa sebanyak 97.805 jiwa atau 35,31% diikuti oleh orang Banjar sekitar 79.345 jiwa atau 28,65%. Kemudian suku Jambi sebanyak 31.962

²¹ Sejarah Singkat., <https://ttanjabbarkab.go.id> . Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2025.

jiwa atau 11,54%, kemudian suku asal sumatera lainnya sekitar 21.103 jiwa atau 7,62%, diikuti orang Melayu di luar Jambi sebanyak 19.716 jiwa atau 4,28% orang Minangkabau sebanyak 7.428 jiwa atau 2,68% dan selebihnya adalah orang Tionghoa serta suku lainnya sebanyak 2,80%.

2.3.2 Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi Tanjung Jabung Barat memiliki pertumbuhan yang dinamis, terutama di sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertambangan dan penggalan juga mengalami pertumbuhan signifikan, bahkan melebihi sektor pertanian di beberapa tahun terakhir. Perekonomian daerah ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam seperti kelapa sawit, pinang, kelapa dan hasil hutan lainnya serta cadangan minyak bumi dan gas.

2.4 Visi Misi dan Struktur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.4.1 Visi Misi

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 2021 – 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Tanjung Jabung Barat maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024. Visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat “MEWUJUDKAN KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis.

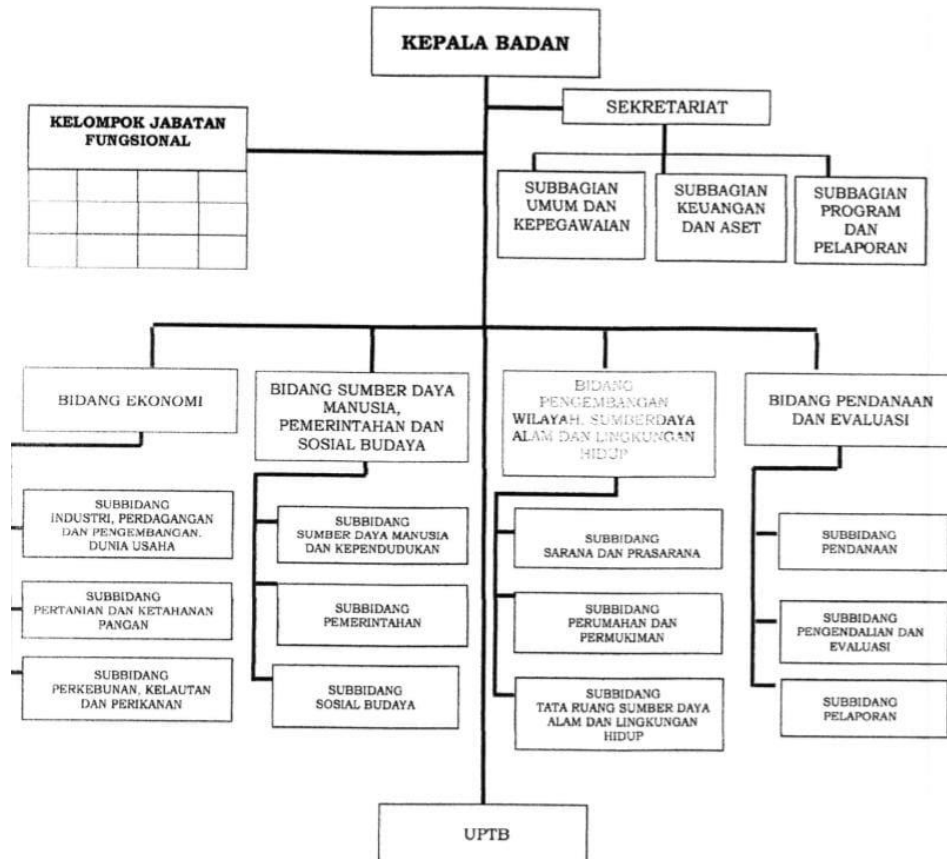
2.4.2 Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada saat ini adalah Drs.H.Anwar Sadat,M.Ag yang menjabat sebagai Bupati. Wakil Bupati yang mendampingiya adalah Hairan.SH. Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025.

2.4.3 Struktur Pemerintahan Kabupaten Tanjung jabung

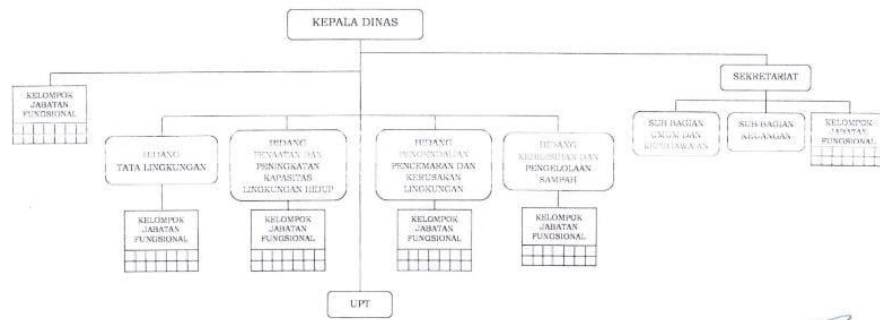
Struktur pemerintahan Tanjung Jabung Barat meliputi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, dan sekretariat Daerah yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah. dinas pemerintahan daerah yang diteliti adalah dinas bappeda serta dinas lingkungan hidup.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Tanjung Jabung Barat



Sumber : Data BAPPEDA Tanjung Jabung Barat

Gambar 2.2 Struktur Organisasi dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat



Sumber : Data Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dari struktur organisasi di atas maka masing-masing jabatan dan instansi mempunyai tanggung jawab dan peran yang berbeda seperti yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Dinas Bappeda sendiri mempunyai peran dalam perencanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan Pembangunan di daerah, serta memastikan proses Pembangunan yang berjalan dengan baik, seperti kita ambil contoh dalam menangani air pasang surut bappeda merencanakan proses pembangunan derinase, penebalan dan perbaikan tinggi jalan, serta peninggian tanggul, setelah melakukan perencanaan dan berjalannya proses Pembangunan dengan baik.
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah perangkat daerah yang berperan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. DLH bertanggung jawab memastikan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut adalah peran utama Dinas Lingkungan Hidup: perumusan kebijakan lingkungan,

pengendalian dan pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan ruang terbuka hijau, edukasi dan penyuluhan lingkungan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menanggulangi Pasang Surut Air Laut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

pengertian mengenai pemerintah daerah disini terdapat makna atau pengertian dapat di artikan bahwa peran pemerintah daerah tanjung jabung barat khususnya daerah kuala tungkal adalah:

Peran sebagai motivator kita dapat mengambil contoh pemerintah daerah tungkal Peran Pemerintah dalam Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat Terkait Larangan Membuang Sampah ke Saluran Drainase

Permasalahan sampah merupakan isu krusial yang berdampak langsung terhadap sistem drainase dan pengendalian banjir, terutama di daerah pesisir seperti Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah satu penyebab utama terganggunya fungsi saluran drainase di wilayah ini adalah kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama ke dalam saluran air. Hal ini menyebabkan tersumbatnya drainase, yang pada gilirannya memperparah genangan air saat pasang surut atau saat curah hujan tinggi. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah daerah, melalui dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan kecamatan setempat, aktif melaksanakan program penyuluhan kepada masyarakat.

3.1.1 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Motivator

1. Saluran Dreinase

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif dari membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase yang seharusnya berfungsi sebagai jalur aliran air.

Penyuluhan dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

A. Sosialisasi Langsung di Tingkat RT/RW

Fenomena air pasang surut adalah siklus alami naik dan turunnya permukaan air laut atau perairan yang terhubung dengan laut, seperti sungai di daerah pesisir. Di wilayah seperti Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, yang merupakan daerah pesisir dan dilalui banyak sungai, dampak pasang surut sangat signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan sosialisasi langsung di tingkat RT/RW menjadi krusial untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan warga. Dengan penyuluhan sosialisasi langsung yang komprehensif dan didukung oleh data akurat, masyarakat di Kuala Tungkal dapat lebih siap menghadapi siklus air pasang surut, meminimalkan dampaknya, dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan pesisir mereka.

Sebagaimana yang dapat di sampaikan oleh Bapak Budi selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH) Mengatakan bahwa :

menjaga dan melastarikan lingkungan terutama dalam kebersihan kalau nggak kita yah siapa lagi, pemerintah kan sudah membuat saluran derinase dalam mengatasi saat air pasang surut nih biar nggak berdampak kali bagi masyarakat, tapi sayangnya Pembangunanannya sudah jadi dan sudah bagus, hasil dari dreinase ini pun sudah ada tapi masyarakat kok malah bung sampah nya ke saluran dreinase ini, yah tersumbat lah salurannya coba adek bayangkan nih saluran dreinase ini kan langsung mengarah kelaut , kalau sampah dari masyarakat inikan pasti nyangkut di dreinase tersebut. Pas air mulai pasang nanti yang seharusnya aliran air yang langsung ke laut malah jadi buntu , biasanya air pasang bisa teratasi dalam waktu yang singkat ini malah bisa lama, dinas kami juga pernah bekerja sama dengan Dinas Prencanaan Dan Pembangunan Untuk melakukan sesi gotong royong pada masyarakat , 4 dari 5 RT setuju dalam melakukan gotong royong, RT tersebut yaitu RT 11,14,16,dan 18 yang berpusat di Tengah kota kualaa tungkal. Saya berharap masyarakat mau dalam menjaga kebersihan kota tungkal ini terkhususnya saluran dreinase yang sudah di buat oleh pemerintah.²²

NO	RT	STATUS PARTISIPASI	KETERANGAN
1	11	Setuju untuk berpatisipasi	Akan menggerakan warga kerja bakti mingguan

²²Hasil wawancara Bersama Bapak Budi Selaku sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH). Hasil Inteviu Pada Tanggal 5 Mei 2025, Pukul 11.30 WIB. Bertempatan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

2	14	Setuju untuk berpartisipasi	Sudah memiliki jadwal gotong royong
3	16	Setuju untuk berpartisipasi	Meminta bantuan tempat sampah dari kelurahan
4	18	Setuju untuk berpartisipasi	Akan mengirimkan karang taruna dan PKK
5	20	Menolak	Warga sedang fokus dalam penanaman padi di karenakan sudah musim panen

1.2 Tabel Data Sampel partisipasi RT ²³



²³ Data di ambil dari catatan bapak budi selaku pejabat pengawas lingkungan pada dinas BPLH



3.1 Sumber dari BPLH

B. Kampanye Lingkungan Melalui Spanduk dan Media Sosial

Pemerintah daerah juga memanfaatkan media luar ruang dan media digital sebagai sarana kampanye edukatif. Spanduk, baliho, serta unggahan di media sosial resmi pemerintah berisi pesan-pesan singkat namun efektif tentang bahaya membuang sampah ke drainase, serta ajakan untuk berpartisipasi menjaga lingkungan.

Sebagaimana yang dapat di sampaikan oleh Bapak Budi selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH) Mengatakan bahwa :

Kami juga sering melakukan beberapa upaya dalam mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya dreinase saja tapi memeang lingkungan , kayak sepanduk , buanglah sampah pada tempatnya di beberapa area titik di kota kuala Tungkal ini. Selain spanduk kami juga mempunyai media sosial untuk memberikan arahan kepada masyarakat , salah satu media sosial yang kami sering gunakan yaitu facebook. Adek bisa mencari langsung PENCERAHAN TANJUNG JABUNG BARAT.



3.2 Sumber di ambil dari pencerahan Tanjung Jabung Barat facebook

C. Pengenalan dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pemerintah juga memperkenalkan sistem pengelolaan sampah skala rumah tangga, seperti memilah sampah organik dan anorganik, serta pemanfaatan bank sampah. Dengan pengelolaan yang baik, volume sampah yang dibuang ke lingkungan dapat ditekan secara signifikan. Melalui rangkaian kegiatan penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa membuang sampah ke saluran air bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang lebih luas, seperti banjir, pencemaran air, dan munculnya berbagai penyakit. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pengendalian bencana di

daerah pesisir yang sangat rentan terhadap perubahan pasang surut air laut. Dengan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan saluran drainase diharapkan semakin meningkat. Keberhasilan penyuluhan ini akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam melakukan pendekatan komunikatif, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam mengubah pola pikir dan perilaku terhadap pengelolaan sampah.

Selain penyuluhan tentang sampah pemerintah daerah juga melakukan penyuluhan tentang pentingnya preboisasi atau penanaman ulang pohon mangrove

2. Mangrove

Penyuluhan Pemerintah kepada Masyarakat Tungkal Ilir tentang Pentingnya Penanaman Ulang dan Pelestarian Hutan Mangrove Kecamatan Tungkal Ilir, yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, merupakan daerah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan lingkungan, seperti abrasi pantai, banjir besar, dan pasang surut air laut. Salah satu upaya alami yang sangat penting dalam menanggulangi persoalan tersebut adalah menjaga kelestarian hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang garis pantai dan muara sungai. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan mangrove di daerah ini mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan untuk tambak dan permukiman, serta penebangan pohon mangrove secara ilegal. Menyadari pentingnya peran ekosistem mangrove sebagai benteng alami yang melindungi wilayah pesisir dari bencana lingkungan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Lingkungan

Hidup (DLH), Dinas Perikanan dan Kelautan, serta bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa, gencar melakukan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya warga pesisir di Tungkal Ilir.

Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fungsi ekologis mangrove dan mengajak mereka berperan aktif dalam kegiatan penanaman ulang (rehabilitasi) serta menjaga kelestarian hutan mangrove yang tersisa. Kegiatan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

A. Sosialisasi di Desa-desa Pesisir Tungkal Ilir

Pemerintah mengadakan pertemuan dengan masyarakat di desa-desa pesisir seperti Kelurahan Kampung Nelayan, Tungkal Harapan, dan Sriwijaya. Dalam pertemuan ini disampaikan materi tentang dampak kerusakan mangrove, seperti meningkatnya banjir rob dan hilangnya habitat ikan, serta pentingnya menjaga dan menanam kembali pohon mangrove secara berkelanjutan.

Pemerintah bekerja sama dengan LSM lingkungan dan akademisi dari universitas lokal untuk memberikan pelatihan teknis kepada kelompok nelayan, karang taruna, dan organisasi masyarakat desa tentang teknik penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan kawasan mangrove.

B. Program Penanaman Bersama (Gotong Royong Mangrove)

Pemerintah daerah melibatkan warga dan pelajar dalam kegiatan tanam mangrove di wilayah pesisir yang mengalami kerusakan, seperti di sepanjang Sungai

Pengabuan dan pesisir Pantai GOR. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk merehabilitasi lahan kritis, tetapi juga untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan.

Sebagai bagian dari penyuluhan, masyarakat juga dikenalkan dengan potensi ekonomi dari mangrove, seperti pengolahan buah mangrove menjadi sirup atau dodol, serta pemanfaatan ekowisata berbasis mangrove yang dapat meningkatkan pendapatan warga. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi memandang mangrove sebagai penghalang pembangunan, tetapi sebagai sumber daya yang bernilai tinggi secara ekologis dan ekonomis.

Melalui berbagai kegiatan penyuluhan ini, pemerintah berharap masyarakat Tungkal Ilir dapat memahami bahwa pelestarian hutan mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan kewajiban bersama. Penanaman ulang dan perawatan mangrove diharapkan dapat menjadi budaya baru masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana lingkungan di masa depan. Dengan pendekatan yang berbasis partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, pelestarian hutan mangrove di Tungkal Ilir dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi yang akan datang.



3.3 Sumber facebook pencerahan tanjung jabung barat

Selain itu adanya juga penyuluhan dari BAPPEDA khususnya bapak budi selaku pejabat pengawas lingkungan hidup ia mencetuskan tentang:

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup, dalam mengatasi dampak pasang surut air laut di wilayah Tungkal Ilir adalah dengan melakukan

penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menyesuaikan bentuk bangunan rumah dengan kondisi geografis wilayah, yang sering terdampak air pasang.

Dinas Lingkungan Hidup secara aktif memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir dan dataran rendah, untuk membangun atau mengubah rumah menjadi rumah panggung. Rumah panggung dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi genangan air pasang yang kerap terjadi saat musim pasang besar.

Adapun alasan utama dipilihnya rumah panggung sebagai bentuk adaptasi terhadap pasang surut adalah sebagai berikut:

Mempercepat Aliran Air: Rumah panggung memiliki ruang di bawah bangunan yang memungkinkan air pasang mengalir dengan bebas, sehingga tidak menggenangi permukaan rumah atau halaman.

Mengurangi Risiko Kerusakan Fisik: Bangunan yang ditinggikan akan lebih tahan terhadap terjangan air laut, terutama saat pasang naik secara ekstrem. Mendukung Kesehatan Lingkungan: Dengan lancarnya aliran air, maka potensi genangan yang dapat memicu penyakit seperti demam berdarah dan gatal-gatal dapat diminimalisir.

Sebagai Bentuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim: Mengingat adanya kecenderungan naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim global, maka rumah

panggung menjadi bentuk adaptasi yang relevan dan berkelanjutan. Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat tidak hanya diberikan informasi secara lisan, tetapi juga melalui media visual dan simulasi teknis pembangunan rumah panggung yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Dinas Lingkungan Hidup juga berupaya mendorong masyarakat untuk mengedepankan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Meskipun dihadapkan dengan keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, namun upaya penyuluhan ini tetap dijalankan secara bertahap. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan, tokoh masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat edukasi dan pendampingan dalam proses adaptasi tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan mengenai pembangunan rumah panggung oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian penting dari strategi adaptasi struktural yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi fenomena air pasang surut di wilayah Tungkal Ilir.

Selain pemerintah yang sebagai motivator, pemerintah juga mempunyai peran sebagai penyedia barang atau fasilitas yang akan digunakan dan dinikmati oleh masyarakat.

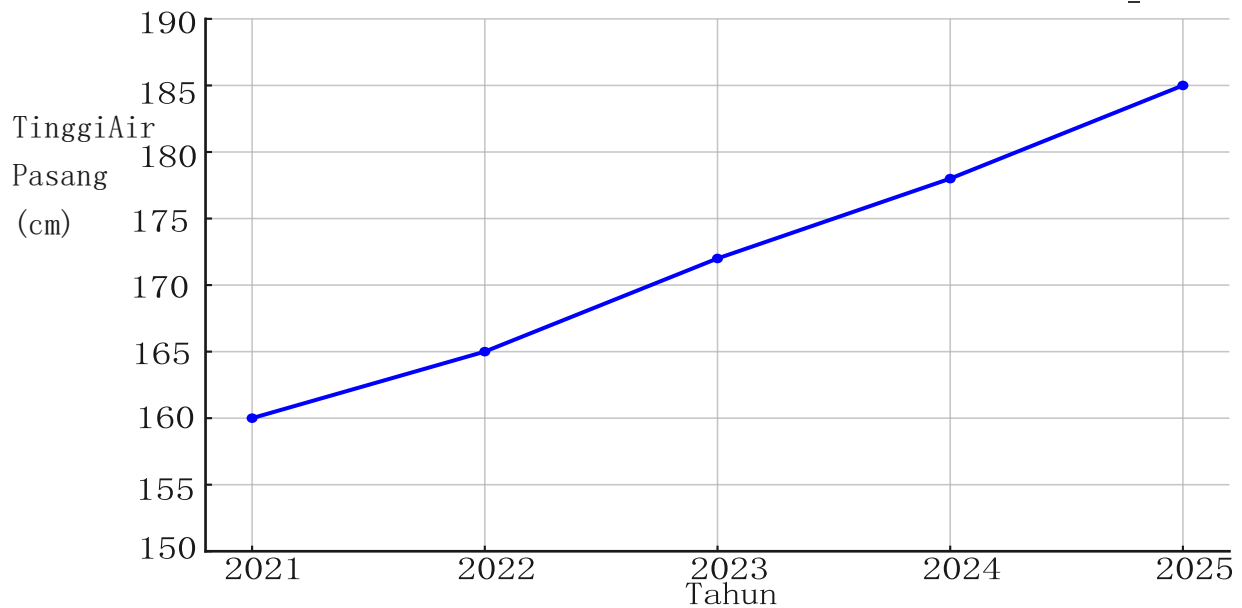
3.1.2 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peranan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pasang surut air laut dapat dilihat dari pembangunan

insfatruktur seperti penebalan jalan yang mencapai 20-30 cm. Hal ini bertujuan untuk menghindari tertutupnya jalan akibat air pasang yang biasanya terjadi pada awal dan akhir tahun. Penebalan jalan dengan cara menambah tingginya aspal ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa menggunakan akses jalan tanpa takut kendaraannya terendam air sesuai dengan hasil dari wawancara Bapak Budi, selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH) Tanjung Jabung Barat mengatakan bahwa :

“Penebalan jalan dilakukan di beberapa ruas jalan yang dianggap paling sering terkena dampak dari pasangannya air laut. Penebalan jalan setinggi 20-30 cm, ada yang berbentuk beton dan ada yang aspal. Upaya penebalan jalan beton juga terus dilakukan, mengingat jalan aspal tentunya cepat amblas dan rusak jika tergenang air, dan kami dinas lingkungan hidup juga sudah berkoordinir dengan bappeda dalam membangun dan menjaga derinase yang sedang di buat , program itu sudah lama di buat dan di cetuskan tapi permasalahan lainnya tentang masalah sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat , menumpuk semuanya jadi nyumbat derinase yang lama nih arus air yang sebelumnya langsung mengalir kelaut jadi terjebak dan tersumbat , kadang kami dinas lingkungan hidup sudah berkali-kali memberi arahan kepada masyarakat , tapi banyak juga masyarakat yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ada prihal permasalahan lain juga yang sudah kami teliti sangat lama , yaitu prihal bentuk rumah , dulu rumah di tungkal banyak yang bentuk panggung , jadi pas air pasang mudah surutnya , tapi sekarang ini banyak rumah-rumah timbunan beton , itu juga yang membuat air payah surutnya.”²⁴

²⁴ Hasil dari wawancara Bapak Budi, selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH) Tanjung Jabung Barat, Interview pada tanggal 5 mei 2025 sekitar puku 11.30 wib (siang hari)



3.1 Tabel Grafik Pasang Surut Tahun Ke Tahun²⁵

Selain menambah ketebalan akses jalan, pemerintah juga membangun sistem drainase di jalur – jalur jalan yang rentan mengalami banjir saat terjadinya air pasang. Drainase ini bertujuan untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem ini mencegah genangan air dan banjir terutama akibat hujan, dengan mengalirkan air ke badan air yang lebih besar seperti sungai dan laut. program Langkah-langkah pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

²⁵ Data di ambil dari bapak Budi selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup perencanaan lingkungan hidup (BPLH) pengambilan data di ambil pada 3 juli 2025 sekitar pukul 12.29 (siang hari)

A. Program Penebalan Jalan

program Pembangunan dan penaikan ketebalan aspal dari tahun ketahun alasan terciptanya program ini untuk melihat batasan atau meminimalisir dari dari dampak air pasang bagi pengendara dan umum, penebalan tidak bisa langsung di lakukan dengan semaksimal mungkin, pemerintah hanya bisa mengamati dan setelah di lakukan pengamatan pemerintah akan melakukan program untuk meningkatkan berapa centimeter ketebalan jalan.

2. Program Saluran Derinase

program Derinase atau pembuatan paret besar , program ini sebelumnya sudah ada di pusat kuala tugkal di daerah pasar dan sekitar , tapi karena saluran tersebut tersumbat dan air tidak menemukan arah balik serta beberapa derinase yang ketimbun karena Pembangunan tempat tinggal wilayah sekitar hal ini membuat pemda melakukan Pembangunan ulang saluran derinase , hal ini juga sesuai dengan wawancara dengan Ibu Nuraini selaku pejabat Fungsional Perencanaan Ahli Muda, mengatakan bahwa :

“ Sistem drainase yang terentigras memberikan dampak baik terhadap penanganan pasang air yang meluap ke jalan – jalan, pengelolaan drainase yang sesuai sangat memberikan dampak besar. Dari itu dari awal dibuatnya jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat semuanya dilengkapi dengan drainase mengingat kondisi Tanjung Jabung Barat yang rawan terhadap banjir ketika air pasang di awal dan akhir tahun, kami juga tidak bisa asal bergerak saat melakukan Pembangunan itu kata pusat, kami hanya menerima keluhan dan saran dari masyarakat serta kami melakukan pengamatan langsung , apakah setiap tahun adanya peningkatan saat air pasang setelah melakukan pengamatan kami mulai dengan Menyusun program dan menunggu

pengesahan dalam program tersebut , program yang sudah disahkan akan kami tindak lanjut sebgaimana semstinya. “. ²⁶

Sistem Drainase tentunya akan memberikan dampak positif untuk masyarakat terutama membantu upaya perkebunan dan pertanian. Dampak pasang air laut yang menyebabkan air naik juga berakibat buruk terhadap perkebunan masyarakat sekitar secara langsung.

Opung pemilik lahan pada di daerah tepian, mengatakan bahwa :

“Pada saat air laut pasang, lahan padi saya terendam air. Ini beberapa kali menyebabkan saya gagal panen. Drainase (paret besar) memang telah dibuat dibeberapa jalur, namun terkadang sistem drainase ini tidak membawa pengaruh terhadap aliran air yang terus masuk ke lahan padi saya ketika terjadi pasang yang tinggi. Saya berharap pemerintah mengupayakan hal ini, karena saya sangat membutuhkannya, terutama daerah saya ini berada di pinggiran pemukiman warga , sehingga pemerintah sangat jarang mengawasi dan memberikan fasilitas yang sama , syukur-syukur pemerintah mempunyai program pembuatan paret besar, jadi dampak gagal panen yang di hindari tidak terlalu besar.”. ²⁷

Disinilah pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat bisa mengupayakan optimalisasi penanganan terhadap dampak pasang surut air laut yang berakibat besar pada sektor perekonomian di daerah Tanjung Jabung Barat. Upaya drainase yang terintegrasi menjadi upaya paling optimal agar air yang masuk ke lingkungan masyarakat bisa di alirkan ke tempat yang semestinya. Penebalan jalan dan sistem

²⁶ Hasil wawancara Bersama Ibu Nuraini selaku pejabat Fungsional Perencanaan Ahli Muda dinas badan perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) interview ini pada tanggal 24 april 2025 pukul 14.00 wib (siang hari)

²⁷ Hasil wawanca Bersama Opung (Rusti Siregar) pemilik lahan pada di daerah tepian, interview ini di lakukan di tanggal 25 mei 2025 pada puku 13.30 wib (siang hari)

drainase merupakan upaya penting yang terus dilakukan Pemerintah Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat pasang surut air laut.

Ibu Nuraini selaku Pejabat Fungsional Perencanaan Ahli Muda, mengatakan bahwa :

“ Dari pihak pemerintah kabupaten terus mengupayakan dengan maksimal persoalan ini, namun kami juga melakukan penyuratan dan mekanisme lainnya terkait bantuan dari pemerintah Kota Jambi dan pusat. Sebab ada beberapa sungai – sungai yang masuk kedalam bagian dari tanggung jawab pemerintah kota Jambi juga “.²⁸

3.1.3 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Dinamisator

Wilayah Tungkal Ilir merupakan salah satu daerah pesisir yang secara geografis sangat rentan terhadap dampak pasang surut air laut. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah, seperti genangan air di permukiman, kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatnya risiko kesehatan akibat lingkungan yang tidak higienis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil peran strategis sebagai dinamisator, yakni sebagai penggerak, inisiator, fasilitator, dan komunikator yang mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam proses mitigasi dan adaptasi bencana pasang surut.

²⁸ Hasil wawancara Bersama Ibu Nuraini selaku pejabat Fungsional Perencanaan Ahli Muda dinas badan perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) interview ini pada tanggal 24 april 2025 pukul 14.00 wib (siang hari)

A. Menginisiasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Penyadaran Masyarakat

Pemerintah daerah menyadari bahwa solusi penanganan bencana air pasang tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, namun juga pada penguatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kesadaran menjadi prioritas utama. Program pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara berkala di berbagai kelurahan terdampak, seperti Kelurahan Tungkal III dan IV. Materi yang disampaikan meliputi edukasi tentang penyebab pasang surut, cara bertindak cepat saat banjir datang, serta pentingnya menjaga lingkungan agar drainase tidak tersumbat.

Contoh pelaksanaan kegiatan yaitu pelatihan tanggap darurat di Balai Kelurahan Tungkal IV pada Maret 2024, dihadiri oleh 35 peserta dari RT 07 dan RT 08, yang dipandu langsung oleh tim dari BPBD Kabupaten.

B. Menjadi Jembatan Koordinasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Sebagai dinamisator, pemerintah daerah juga mengambil peran sebagai penghubung antar aktor. Dalam praktiknya, hal ini dilakukan dengan menjalin kerja sama antara instansi pemerintah lintas sektoral, dunia usaha melalui program CSR, serta kelompok masyarakat. Misalnya, Dinas PUPR dan Bappeda bekerjasama dengan perusahaan sawit dan pelabuhan dalam perencanaan dan pembiayaan peninggian jalan

rawan genangan. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pembentukan forum warga pesisir untuk menampung aspirasi masyarakat terkait penanganan banjir pasang.²⁹

Pada tahun 2023, Jalan Beringin – yang sebelumnya menjadi titik genangan setiap air laut pasang – berhasil ditinggikan sepanjang 750 meter berkat kolaborasi antara APBD, CSR PT Pelindo Tungkal, dan gotong royong masyarakat setempat.

Contoh lainnya adanya Kerjasama antar pemerintah dan instansi dalam mengambil peran mengupayakan dampak pasang air laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bentuk tanggung jawab dalam kewenangannya terhadap daerah dan bentuk kontribusi pemerintah dalam memberikan solusi kepada masyarakat atas dampak lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penebalan jalan, pembuatan sistem drainase, koordinasi pemerintah dan instansi semakin menguatkan peran pemerintah dalam meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat pasang surut air laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selain peran sebagai fasilitator pemerintah juga menjalin hubungan kerja sama dengan pihak swasta. Hal ini juga di cantumkan di LKJIP atau laporan kinerja pemerintah terdapatnya hubungan kerja sama dalam proyek Pembangunan dan penebalan fasilitas jalan oleh pihak swasta sekitar.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat M.Ag, menerima audiensi Forum Pelestarian Mangrove Pangkal Babu (FPMPB) di Rumah Dinas Bupati pada 3

²⁹ Data Yang Bersumber Dari Bapak Budi Selaku Pejabat Pengawa Lingkungan Hidup Dinas BPLH

Januari 2024. Forum ini berdiri sejak 5 September 2023 dan bertujuan melestarikan ekosistem mangrove serta mengembangkan kawasan tersebut sebagai ekowisata. Wakil Ketua FPMPB, Ramaditya Khadifa Firdaus, menyampaikan keinginan untuk berkolaborasi dengan Pemda, termasuk melalui pengajuan proposal pelebaran jalan, listrik, sinyal, parkir, dan mushola di kawasan ekowisata. Bupati menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya ikon lokal seperti lutung dan kepiting bakau untuk menarik investor dan wisatawan. Ia juga menyoroti rencana penerangan jalan dengan lampu tenaga baterai dan pentingnya hibah tanah sebagai syarat pelebaran jalan, sesuai mekanisme pembangunan daerah.

C. Mendorong Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat

Pemerintah daerah menyadari bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam merespons bencana pasang surut. Untuk itu, diciptakanlah program "RT Siaga Pasang" yang berbasis swadaya. Melalui program ini, warga diminta untuk membentuk kelompok kerja yang bertugas membersihkan saluran air, menyiapkan karung pasir, dan melaporkan kerusakan infrastruktur ke pihak kelurahan.

Contoh nyata dari program ini terlihat di RT 17 Kelurahan Tungkal III, di mana sejak 2022 masyarakat telah membentuk tim tanggap yang terdiri dari 10 orang dan berhasil menurunkan frekuensi genangan sebesar 40% selama musim pasang 2023.

D. Memfasilitasi Infrastruktur Penanggulangan Jangka Menengah

Pembangunan infrastruktur penanggulangan pasang menjadi prioritas, meskipun terbatasnya anggaran daerah seringkali menjadi kendala. Pemda terus mengupayakan peninggian jalan, pembangunan drainase, dan penguatan tanggul di wilayah rawan. Proyek-proyek ini dilaksanakan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas dampak.

Salah satu contoh adalah pembangunan drainase berkekuatan tinggi dengan sistem katup satu arah di Jalan Nelayan yang dimulai akhir 2023 dan selesai pada awal 2024 dengan anggaran Rp 450 juta. Sistem ini mencegah air laut masuk saat pasang namun tetap memungkinkan aliran air keluar saat surut.

E. Mengeluarkan Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Selain langkah fisik dan sosial, peran dinamisator juga tercermin dalam penyusunan kebijakan yang memberdayakan masyarakat. Pemerintah Daerah mengeluarkan beberapa regulasi penting, seperti SK Bupati No. 28 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Pasang Surut dan Perbup tentang Alokasi Dana Kelurahan untuk kegiatan penanggulangan bencana lingkungan.

Pemerintah juga menyaratkan pengembang perumahan baru di kawasan pesisir untuk menyediakan drainase tahan pasang dan rumah panggung sebagai syarat perizinan.

F. Menyediakan Informasi dan Sistem Peringatan Dini

Akses terhadap informasi yang cepat dan akurat sangat penting untuk meminimalisir dampak pasang. Oleh karena itu, Pemda menyediakan papan informasi tinggi air pasang di pelabuhan dan kantor kelurahan. Selain itu, update pasang surut disampaikan melalui radio lokal dan media sosial BPBD secara berkala setiap minggu.

Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan warga, terutama nelayan dan pedagang pasar yang sangat bergantung pada kondisi pasang surut

3.2 Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menanggulangi Pasang Surut Air Laut di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hambatan dalam upaya menanggulangi pasang surut air laut di daerah Tanjung Jabung Barat tentu saja ada. Hambatan dalam pembangunan infrastruktur yang sering ditemui ialah antara lain:

1. Tingginya pasang air laut di awal dan akhir tahun

Jika terjadinya pasang air laut yang tinggi tentu saja menyebabkan genangan dan tenggelamnya beberapa ruas jalan. Genangan air biasanya mencapai 20 cm dan menutup akses jalan. Akses jalan yang tertutupi menyebabkan struktur beton atau aspal jadi mudah rusak. Pasangnya air yang tinggi juga membuat

pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Pemeliharaan jalan juga terkendala dan mempertimbangkan waktu dalam pembangunan biasanya jalan di aspal yang berakibat jalanan cepat rusak kembali ketika terendam air laut.

2. Sistem drainase yang landau hampir sama dengan permukaan laut

Drainase fungsinya ialah menampung dan mengalirkan air yang masuk dari laut atau sungai ke tempat yang semestinya agar tidak masuk ke daratan dan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat. Namun, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat banyak ditemukan drainase yang masih landau dan tingginya sama dengan permukaan air laut. Hal ini tentunya menyebabkan air yang masuk ke drainase tidak bisa dibatasi volumenya karna drainase yang landai tidak bisa menampung air yang akan di alirkan dengan maksimal. Drainase yang landai tentunya menyulitkan aliran air untuk cepat bisa tersalurkan ke tempat yang semestinya.

3. Sampah yang masuk ke drainase

Drainase yang dibuat di ruas – ruas jalan harusnya memberikan dampak baik terhadap penanggulangan ketika air pasang naik ke permukaan. Namun, tak jarang drainase tersumbat akibat banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke dalam drainase sehingga drainase tersumbat dan tidak bisa mengalirkan air yang naik ke permukaan ke saluran air yang telah dibuat. Dampak sampah yang masuk ke drainase ini sangat besar, selain

membuat drainase tersumbat juga mengakibatkan pencemaran lingkungan oleh aroma dan pemandangan yang sangat tidak sehat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Upaya masyarakat sangat diperlukan untuk pemeliharaan drainase yang telah dibuat, masyarakat diharapkan sadar akan upaya dalam menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal mereka agar dampak kerusakan lingkungan bisa di atasi semaksimal mungkin.

4. Perbedaan kewenangan dalam pengelolaan sungai

Aliran air laut yang masuk dari sungai – sungai dan menyebabkan akses jalanan tertutup ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab dan peran dari pemerintah Tanjung Jabung Barat saja. Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada ditengah – tengah beberapa sungai yang peran dan tanggung jawab dalam upaya mengendalikan dampak pasang air laut ini dibedakan antar kewenangannya. Ada beberapa sungai yang secara pengelolaan dan tanggung jawab berada pada Pemerintah Kota Jambi. Dalam hal ini, pemerintah Tanjung Jabung Barat menyurati Pemerintah terkait. Pengelolaannya tidak hanya bersumber dari APBD daerah, namun pemerintah Tanjung Jabung Barat juga bekerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang beroperasi di daerah ini agar upaya yang dilakukan dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan akibat pasang surut air laut bisa terkondisikan dengan maksimal.

5. Sistem drainase yang tidak terkoneksi

Sistem drainase yang tidak terintegrasi menyulitkan aliran air untuk bisa sampai ke pembuangan akhir. Pembangunan drainase di ruas – ruas jalan banyak ditemukan drainase yang tidak terkoneksi antara drainase yang satu dengan yang lain. Harusnya pembangunan drainase haruslah saling terkoneksi antara drainase primer, sekunder dan tersier mengingat fungsi drainase dibuat. Tidak terkoneksi drainase ini tak jarang mengakibatkan air yang ditampung oleh drainase tidak dialirkan dan terputus di beberapa drainase yang tidak punya koneksi ke drainase yang lain. Terputusnya koneksi drainase yang tidak terintegrasi menyebabkan air yang dialirkan drainase ikut meluap dan akhirnya menyebabkan genangan disekitarnya.

Bapak Toni selaku pengguna infrastruktur jalan Kuala Tungkal, mengatakan bahwa :

“Jalan – jalan yang dibangun baik beton dan aspal selalu mengalami penebalan, tapi tak jarang juga kendaraan bermotor dan mobil masih bisa terendam air ketika air pasang datang. Ini menyebabkan kendaraan jadi berkarat dan masa pakainya atau umur kendaraan jadi lebih pendek”.³⁰

Selain bapak Toni, Bapak Azmi yang merupakan masyarakat Kuala Tungkal juga mengatakan bahwa ;

“Jalan-jalan yang diupayakan penebalan sering mengalami kendala ketika pasang air naik, pemaksimalan penebalan jalan jadi sering terkendala akibat air pasang masuk dan drainase tidak cukup menampung aliran air karena

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak toni salah satu penduduk asli kuala tungkal dan pengguna infrastruktur tungkal. Interview ini dilakukan di tanggal 24 mei 2025 pada puku 15.30 wib

drainase dipenuhi sampah. Jadinya pembangunan dan penebalan jalan sering tertunda dan lama progresnya”.³¹

6. Tersumbatnya Drainase oleh Sampah

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan menyebabkan drainase tersumbat oleh sampah rumah tangga. Hal ini memperburuk genangan saat pasang dan merusak fasilitas umum, selain itu dampak dari menumpuknya sampah di pinggir saluran air bisa membuat saluran air menjadi lambat bahkan tidak bergerak sama sekali, padahal seharusnya saluran drainase menjadi suatu program dari pemerintah yang dapat menangani permasalahan tentang air yang pasang sangat lama.

Pemerint sering melakukan dorongan kepada masyarakat agar memiliki inisiatif sendiri dalam menjaga dan mengelolah fasilitas-fasilitas yang sudah ada , sehingga fasilitas yang dibuat bisa bekerja dengan semestinya dan tanpa adanya hambatan.

7. Keterbatasan Anggaran Pembangunan

Kondisi keuangan daerah yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat utama. Penanganan pasang surut membutuhkan anggaran besar dan berkelanjutan, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Serta pemasukan dari pendapatan daerah sangat minim , yang membuat proses Pembangunan fasilitas sedikit terhambat , pemerintah daerah juga terkadang melakukan hubungan kerja sama dengan pihak luar dan pihak swasta baik dalam segi material maupun bantuan dana , tujuan dari hubbunngan kerja sama tersebut yaitu untuk mempercepat dalam Program Pembangunan yang sudah dibuat.

8. Perbedaan Kewenangan Antarwilayah

Sebagian sungai yang memengaruhi pasang surut berada di bawah kewenangan pemerintah kota lain atau pusat. Hal ini menyebabkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat oleh batas administratif dan birokrasi.

9. Kebiasaan Masyarakat yang Tidak Mendukung

³¹ Interview juga di lakukan dengan bbapak azmi sebagai masyarakat dan juga pemmilik rumah panggung di kuala tungkal , interview ini di lakukan pada tanggal 24 mei 2025 pada pukul 15.00

Banyak masyarakat membangun rumah beton rendah yang menutup jalur aliran air alami. Padahal, rumah panggung lebih sesuai dengan kondisi pasang surut. Selain itu, masih ada perilaku membuang sampah sembarangan ke saluran air.

10. Sistem Drainase yang Tidak Terkoneksi

Drainase yang tidak terhubung antara primer, sekunder, dan tersier menyebabkan air tidak mengalir lancar. Hal ini mengakibatkan genangan air dan membuat drainase tidak berfungsi maksimal.

Beberapa hal di atas merupakan hambatan yang ditemukan dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan akibat pasang surut air laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selama hambatan ini bisa di minimalisir dan diatasi, tentunya juga bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak – dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pasang surut air laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi dampak air pasang surut di Kecamatan Tungkal Ilir, dapat disimpulkan bahwa:

Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pasang surut air laut. Peran ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori peran pemerintah yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator.

Sebagai Motivator, pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan yang telah dirancang. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pendekatan langsung ke masyarakat mengenai pentingnya menjaga drainase tetap bersih serta kesadaran membangun rumah yang sesuai dengan kondisi geografis, seperti rumah panggung.

Sebagai Fasilitator, pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana fisik yang mendukung pengurangan dampak pasang surut, seperti pembangunan dan penebalan jalan, pembuatan sistem drainase yang terintegrasi, serta penyediaan lahan tanggul. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda memiliki peran penting

dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur berbasis mitigasi bencana lingkungan.

Sebagai Dinamisor, pemerintah daerah mengoordinasikan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah lain, tokoh masyarakat, maupun pihak swasta, dalam upaya menangani banjir akibat air pasang. Kolaborasi ini meliputi perencanaan lintas sektor, pembagian kewenangan pengelolaan sungai, serta penggalangan dana dan partisipasi dalam proyek infrastruktur ramah lingkungan.

Namun, dalam pelaksanaannya, peran tersebut masih menemui berbagai kendala, antara lain: keterbatasan anggaran infrastruktur, drainase yang tidak terintegrasi, rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, hingga tumpang tindih kewenangan antarwilayah sungai. Selain itu, perubahan pola pembangunan rumah warga dari rumah panggung menjadi rumah beton juga menyebabkan aliran air terhambat, memperparah dampak pasang surut.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah cukup optimal, namun masih memerlukan peningkatan di sisi koordinasi lintas instansi, penguatan peran masyarakat, dan kesinambungan pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana lingkungan. Keberhasilan mengatasi dampak pasang surut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan pada kesadaran kolektif serta pengelolaan lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan.

Jika kamu ingin saya ubah ke format Word atau PDF, tinggal beri tahu, dan akan saya siapkan langsung.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah daerah sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antarlembaga, edukasi, kebijakan yang lebih tegas, dan partisipasi aktif masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola lingkungan pesisir yang adaptif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan iklim serta dinamika alam.

4.1.2 Kendala Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak pasang surut

Dalam upaya pemerintah daerah menangani dampak pasang surut air laut di Kecamatan Tungkal Ilir, terdapat sejumlah kendala yang secara langsung memengaruhi efektivitas kebijakan dan pembangunan infrastruktur. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Tingginya Pasang Air Laut di Awal dan Akhir Tahun

Peningkatan volume air laut yang cukup signifikan pada periode tertentu seperti awal dan akhir tahun menyebabkan banjir genangan yang merusak infrastruktur jalan. Genangan air tersebut mempercepat kerusakan jalan aspal dan beton, menghambat proses perawatan, serta mengganggu aktivitas pembangunan.

2. Sistem Drainase yang Tidak Optimal

Banyak drainase yang dibangun di wilayah pesisir memiliki elevasi yang sejajar dengan permukaan laut, sehingga air tidak dapat mengalir keluar secara maksimal. Hal

ini menyebabkan genangan tidak cepat surut, bahkan air laut justru dapat masuk kembali ke daratan melalui saluran ini.

3. Sampah yang Menyumbat Saluran Drainase

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mengakibatkan drainase kerap tersumbat oleh sampah rumah tangga. Kondisi ini memperparah banjir saat pasang karena air tidak dapat mengalir dengan lancar ke saluran pembuangan.

4. Perbedaan Kewenangan Pengelolaan Sungai

Beberapa sungai yang memengaruhi aliran pasang di wilayah Tanjung Jabung Barat bukan sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan sungai yang tumpang tindih antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, hingga kewenangan pemerintah pusat menyebabkan koordinasi teknis dan penganggaran menjadi tidak optimal.

5. Keterbatasan Anggaran Infrastruktur

Masalah klasik seperti keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghambat utama dalam pembangunan jalan, tanggul, dan drainase. Pembangunan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat, melainkan harus bertahap mengikuti kemampuan fiskal daerah.

6. Sistem Drainase yang Tidak Terkoneksi

Drainase yang dibangun di beberapa ruas jalan tidak saling terhubung antara saluran primer, sekunder, dan tersier. Akibatnya, aliran air menjadi tidak efektif dan menyebabkan air tertahan di satu titik tanpa bisa dialirkan ke titik pembuangan akhir.

Minimnya Kesadaran Masyarakat

Walaupun pemerintah daerah telah melakukan penyuluhan, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga infrastruktur yang dibangun. Hal ini menghambat upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

7. Perubahan Bentuk Rumah Warga

Dahulu, banyak rumah di Tungkal Ilir dibangun dengan bentuk rumah panggung, yang sangat efektif dalam menghadapi pasang surut. Namun saat ini, tren pembangunan rumah permanen dengan dasar beton justru membuat air pasang sulit mengalir dan memperparah genangan.

4.2 Saran

1. Pemerintahan kuala tungkal akan selalu mengamati dan memberikan arahan kepada masyarakat dalam menjaga dan menerapkan program yang direncanakan atau yang sudah ada , kedepannya dengan penebalan jalan, pembuatan derinase yang akan di jaga dan dirawat oleh pemerintah untukt dapat meminimalisir dari dampak air yang pasang surut bagi masyarakat.

2. Pembangunan dan fasilitas yang dibuat memang bertujuan agar masyarakat bisa memakai dan menikmatinya , pemerintah juga sudah sering memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya merawat dan menjaga fasilitas yang sudah ada , contohnya membuang sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat drainase yang sudah di buat.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adisasmita dan Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Arief dan Arifin, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm.
23. Arief, Arifin, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 93.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 234.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama
- Harahab dan Nuddin, *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove Dan Aplikasinya Dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Irwan, dan Zoeraini Djamal, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 135.
- Istianto dan Bambang, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011)
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Nugroho Iwan, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Nurrochmat, Dodik Ridho, *Strategi Pengelolaan Hutan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)
- Redi dan Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: PT Cahaya Prima Sentosa, 2014)
- Ridwan dan Mohammad, *Perencanaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata*, (Medan Polonia: PT. Sofmedia, 2012)

- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2003),
hal. 40. Salim, dkk, *Pendidikan Lingkungan*, (Jakarta: Universitas
Indonesia (UI-Press), 2019)
- Salim dan syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media,
2012), Hlm. 119.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:
Alfabeta,
2019)

II. JURNAL

- Anugerah Yuka Asmara. 2016. Pentingnya Riset Kebijakan Dalam Pembuatan
Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. (*Jurnal of Public Sector
Innovations*) Vol 1 hal 37-46 Tahun 2016.
- Ahmad Fauzi R, dkk. 2012. *Analisi Peran Pemerintah Daerah terhadap anak
Putus sekolah di Kabupaten Wajo*. Jurnal Program Studi Ilmu
Pemerintahan. Universitas Hasanuddin.
- Primas Anindyajati, dkk. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Sebagai Bentuk Kebijakan Publik*. (*Jurnal Riset Akuntansi
dan Keuangan*) Vol 7 No 2 Tahun 2019

III. SKRIPSI

Gilang Ramadhon, “*Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Pencegahan Aksi Geng Motor*”, Jambi, Universitas Jambi, 2004, hlm.25

WEBSITE

Sejarah Singkat., <https://tanjabbarkab.go.id>. Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat izin penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Jambi - Mu. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. 082162363247, 082162363212/email:hukum@unja.ac.id/laman:law.unja.ac.id

Nomor : 1569/UN21.4/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengantar izin penelitian dan Permintaan Data Skripsi

24 April 2025

Yth

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal
2. Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal
3. Bapak Azmi Masyarakat Dari Daerah Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal
4. Ibu Dewi Masyarakat Dari Daerah Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal

di

Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa

Nama : M Abduh Fadillah Alvi
Nomor Induk Mahasiswa : H1A118133
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul “ **Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dan Mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut Di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat** ” Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.
NIP 196512041990032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH, Kuala Tungkal, Jambi Kode Pos 36511
Laman : <http://bappeda.tanjabbarkab.go.id> Pos-el : bappeda@tanjabbarkab.go.id

Kuala Tungkal, 20 Mei 2025

Nomor : 000.7/114/BAPPEDA/V/SRK/2025
Sifat : Biasa
Hal : Penelitian dan Permintaan Data Skripsi

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama
Fakultas hukum

di -
Jambi

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : 1569/UN21.4/PT.01.04/2025 tanggal, 24 April 2025 tentang izin Penelitian dan Permintaan Data Skripsi Oleh Mahasiswa atas nama

Nama : M. Abduh Fadillah Alvi
NIM : H1A118133
Program Study : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian dan permintaan data skripsi yang berjudul " peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi dan Mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang Surut di Daerah Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat".

Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BAPPEDA,



Feri Noprianto, SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731116 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Beringin No. 01 Telp/Fax. (0742) 7351139
Kuala Tungkal 36513

Kuala Tungkal, 6 Mei 2025

Nomor : 600.4.15.1 224 /DLH/2025
Sifat : Biasa
Perihal : Penelitian dan Permintaan
Data Mahasiswa UNJA

Kepada Yth,
Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum Universitas Jambi
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Bapak Nomor : 1569/UN21.4/PT.01.04/2025 Perihal pengantar
izin penelitian dan permintaan data skripsi oleh :

Nama : M. Abdul Fadillah Alvi
Nomor Induk Mahasiswa : H1A118133
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi dan
Mengurangi Kerusakan Lingkungan Saat Air Pasang
Surut di Daerah Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat"

Adalah benar telah melaksanakan penelitian ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025
sekitar pukul 11.30 WIB (Siang hari).

Demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas,

SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680116 199703 1 002

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara

Pertanyaan seputar lingkungan :

1. Kapan saja waktu pasang surut air laut ? Apakah bisa diperkirakan atau terjadi secara tiba – tiba ?
2. Apa saja yang menjadi dampak lingkungan ketika terjadi pasang surut air ?
3. Apa saja langkah – langkah yang dilakukan dalam mengatasi dampak yang terjadi akibat pasang surut air ?
4. Apakah langkah – langkah yang telah dilakukan efektif ?
5. Mengenai banyaknya sampah yang mencul ketika air pasang, apakah ini berasal dari sampah masyarakat di daerah sini ? bagaimana upaya yang dilakukan agar sampah bisa ditangani ?
6. Apakah ada kemungkinan lebih besar ketika pasang surut air tidak ditangani dengan baik? Apakah akan mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar lagi ?
7. Selain dampak negatif, apa saja dampak positif yang dirasakan ketika air mengalami pasang surut ?
8. Apa saja langkah pengelolaan yang bisa dilakukan dalam mengatasi pasang surut air dilingkungan ini ?

9. Apa harapan Bapak/Ibu kedepan terhadap daerah ini terkait adanya dampak pasang surut air ?

Pertanyaan seputar infrastruktur :

1. Bagaimana dampak pasang surut air terhadap infrastruktur yang ada di daerah ini ?
2. Apa langkah – langkah yang dilakukan dalam mengatasi pasang surut air agar kegiatan masyarakat tidak terkendala ?
3. Dalam pembangunan infrastruktur di daerah ini, apakah pasang surut air juga menjadi dampak signifikan ?
4. Apa yang menjadi dasar pemikiran agar infrastruktur yang dibuat bisa bermanfaat sesuai dengan fungsi dan kendala yang dihadapi kedepan terkait dampak pasang surut air ?
5. Apa saja optimalisasi dalam pembangunan infrastruktur dalam mengatasi pasang surut air ?
6. Selain pertimbangan tinggi jalan, apakah sistem drainase juga sudah dilakukan?
7. Apa hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan infrastruktur di lingkungan yang mengalami dampak pasang surut air ?
8. Apa harapan Bapak/Ibu kedepan untuk daerah ini terkait adanya dampak pasang surut air ?

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Nuraini Selaku Fungsional
Perencanaan Ahli Muda



Dokumentasi wawancara Bersama bapak Budi selaku Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH)



Dokumentasi wawancara Bersama Rusti Siregar Selaku Pemilik
Lahan Padi (Masyarakat Tepian)



Dokumentasi Wawancara Bersama Pak Azmi Selaku Masyarakat
Kuala Tungkal



Sumber : Dokumentasi Pribadi



Sumber : Dokumentasi Pribadi



Sumber : Dokumentasi Pribadi

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

1. Nama : M. Abduh Fadillah Alvi
2. Tempat, Tanggal Lahir : B. Pinang, 30 Januari 2001
3. Nim : H1A118133
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Jl. Bajak II, No 98-A Medan
8. Alamat Sekarang : Jalan Lingkar Selatan II Pal Merah
9. Nomor Telepon/Hp : 082218165636
10. Email : m.abduhwer41@gmail.com



B. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Sekolah/Institusi /Universitas	Jurusan/Prodi	Masa Pendidikan
2006-2012	SD N 0672858 kota medan	-	6 Tahun
2012-2015	SMP N 24 Kota Jambi	-	3 Tahun
2015-2018	SMA N 4 Kota Jambi	IPS	3 Tahun
2018-2025	Universitas Jambi	Ilmu Pemerintahan	6 Tahun 9 Bulan